

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 53.1 TAHUN 2016

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2016



**BAGIAN ORGANISASI
SETDAKAB TAPANULI UTARA**



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 53.1 TAHUN 2016 TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2016

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019 maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014-2019, maka diperlukan penetapan sasaran strategis sebagai acuan dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Utara Tahun **2011-2016**;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Penetapan Kinerja;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara

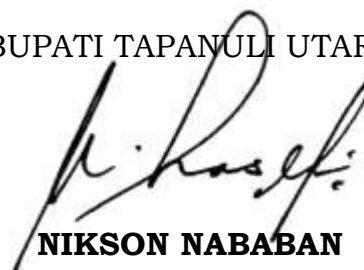
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2016

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati ini, merupakan acuan/ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan disampaikan kepada Bupati Tapanuli Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 2016

BUPATI TAPANULI UTARA,



NIKSON NABABAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2016

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati ini, merupakan acuan/ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan disampaikan kepada Bupati Tapanuli Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 2016

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

ALBOIN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

Nomor : 53.1 Tahun 2016

Tanggal : ddmmyy 2016

Tentang : **INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KBUPATEN TAPANULI
UTARA TAHUN 2016**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2016**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Keterangan
1.	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Angka Partisipasi Kasar PAUD	(Jumlah siswa jenjang PAUD Formal berbagai usia/jumlah penduduk usai jenjang PAUD Formal)x 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			(Jumlah siswa jenjang PAUD Non Formal berbagai usia/jumlah penduduk usai jenjang PAUD Non Formal)x 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka melek huruf (AMH)	(Jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis dibagi dengan jumlah penduduk usia di atas 15 tahun)x 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-rata lama sekolah	(Jumlah tahun bersekolah individu di atas 15 tahun dibagi jumlah penduduk di atas 15 tahun)x 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket	(Jumlah siswa jenjang SD/MI/SDLB/Paket A berbagai usai dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 sd 12 tahun)x 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB/Paket	(Jumlah siswa jenjang SD/MI/SDLB/Paket A berbagai usai dibagi dengan jumlah penduduk usia 7 sd 12 tahun)x 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		Angka Partisipasi Kasar SMP	(Jumlah siswa jenjang SMP/Paket B berbagai usia dibagi dengan jumlah penduduk usia 12 sd 15 tahun)x 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK	(Jumlah siswa jenjang SMA/SMK/Paket C berbagai usia dibagi dengan jumlah penduduk usia 16 sd 18 tahun)x 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ Paket A	(Jumlah siswa usia sekolah per jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah per jenjang pendidikan) x 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ Paket B	(Jumlah siswa usia sekolah per jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah per jenjang pendidikan) x 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ Paket C	(Jumlah siswa usia sekolah per jenjang pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah per jenjang pendidikan) x 100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	(Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya)	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)	(Jumlah ibu melahirkan dibagi 100.000 kelahiran hidup) x 100%	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	(Jumlah angka kematian bayi dibagi 1000 kelahiran hidup) x 100%	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	(Jumlah angka kematian balita dibagi 1000 kelahiran hidup) x 100%	Dinas Kesehatan

		Persentase Balita dengan Gizi Buruk	(Jumlah Balita dengan Gizi Buruk dibagi Jumlah Balita yang sehat) x 100%	Dinas Kesehatan
3.	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	(Jumlah penduduk tahun n dibagi dengan Jumlah penduduk Tahun n-1) x 100%	Dinas Catpil dan Kependudukan
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi sektor :		
		Primer	Pertumbuhan Sektor Primer per tahun x 100%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Sekunder	Pertumbuhan Sektor Sekunder per tahun x 100%	
Tertier	Pertumbuhan Sektor Tertier per tahun x 100%			
5.	Meningkatnya Penanaman Modal	Persentase Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal	(Jumlah Nilai Penanaman Modal tahun ini dibagi dengan penanaman modal tahun lalu) x 100%	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah
		Nilai Investasi	Nilai Investasi dalam setahun	Bappeda
6.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat dan Menurunnya Disparitas Pendapatan	Persentase KK Miskin	(Jumlah KK Miskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku) x100%	Dinas Sosial Nakertrans
		Pendapatan Perkapita	Jumlah pendapatan per kepala per tahun	Dipenloka
		Angka Gini Ratio	Angka Gini Ratio	Dinas Sosial Nakertrans
7.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan Energi Perkapita	(Ketersediaan Energi Perkapita tahun ini dibagi dengan ketersediaan energi perkapita tahun lalu)x 100%	Kantor Ketahanan Pangan
		Persentase Ketersediaan Protein Perkapita	(Ketersediaan Protein Perkapita tahun ini dibagi dengan jumlah ketersediaan protein perkapita tahun lalu) x 100%	Kantor Ketahanan Pangan
		Produktivitas tanaman padi	Jumlah Produksi Padi (Kw) dibagi dengan luas panen per Hektar	Dinas Pertanian

--	--	--	--	--

8.	Menjaga Kualitas Sumberdaya Alam	Persentase Luas Lahan Kritis	(Luas Lahan Kritis yang ditangani dibagi dengan total lahan kritis) x 100%	Kantor Lingkungan Hidup
		Persentase Alih Fungsi Lahan Pertanian	(Luas alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku) x 100%	Kantor Lingkungan Hidup
		Persentase RTH Perkotaan	(Luas RTH Perkotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku) x 100%	Kantor Lingkungan Hidup
9.	Meningkatnya Pelayanan Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	(Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan dibagi dengan total kasus) x 100%	Sekretaris Daerah
10.	Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Sekretariat Daerah
11.	Meningkatnya Kemampuan dan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	Opini BPK	Hasil Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Sekretariat Daerah
		Predikat SAKIP Kabupaten	Hasil Evaluasi SAKIP atas implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Sekretariat Daerah
12.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah
13.	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	(Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) dibagi dengan jumlah pelanggaran K3)x 100%	Kantor Satpol PP
14.	Terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase menurunnya jumlah konflik di masyarakat	(Jumlah konflik tahun ini dibagi dengan jumlah konflik tahun lalu)x 100%	Sekretariat Daerah

15.	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Siaga Bencana	Jumlah Desa Siaga Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
-----	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------------

16.	Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah Pedesaan	Persentase jalan desa dalam kondisi baik	(jumlah ruas jalan desa dalam kondisi baik dibagi total ruas jalan desa) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase rumah layak huni	(Jumlah rumah layak huni dibagi dengan total rumah masyarakat) x 100%	Dinas Cipta Karya dan Perumahan
		Persentase Bangunan ber-IMB Kawasan Non Perumahan	(Jumlah Bangunan ber-IMB Kawasan Non Perumahan dibagi dengan total Bangunan Kawasan Non Perumahan)x 100%	Dinas Cipta Karya dan Perumahan
		Persentase Luas pemukiman yang tertata	(Luas pemukiman yang tertata dibagi dengan total luas pemukiman) x 100%	Dinas Cipta Karya dan Perumahan
		Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	(Jumlah lingkungan permukiman kumuh dibagi total pemukiman) x 100%	Dinas Cipta Karya dan Perumahan
17.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Persentase jalan dalam kondisi baik	(Jumlah ruas jalan dalam kondisi baik dibagi dengan total ruas jalan) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	(Jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi dengan total jembatan) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase drainase Primer dalam kondisi baik	(Jumlah drainase dalam kondisi baik dibagi dengan total drainase) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum
		Persentase infrastruktur sumber daya air berfungsi	(Jumlah infrastruktur sumber daya air yang berfungsi dibagi dengan total infrastruktur sumber daya air) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum

		Persentase lampu penerangan jalan/umum yang berfungsi baik	(Jumlah penerangan jalan/umum yang berfungsi baik dibagi dengan total penerangan jalan/umum)x 100%	Dinas Pekerjaan Umum
--	--	--	--	----------------------

		Persentase jumlah usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	(Jumlah usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dibagi dengan total usaha) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum
18.	Peningkatan Kualitas Lingkungan	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk pada titik pantau penilaian	(Tempat pembuangan sampah (TPS) dibagi dengan jumlah TPS yang seharusnya)x 100%	Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kantor Lingkungan Hidup
		Prosentase penanganan sampah pada pemukiman penduduk	(Persentase sampah yang ditangani dibagi dengan total sampah yang seharusnya ditangani) x 100%	Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kantor Lingkungan Hidup
		Prosentase sungai yang kelas airnya memenuhi syarat	(Jumlah sungai yang airnya memenuhi syarat dibagi dengan total sungai) x 100%	Kantor Lingkungan Hidup
19.	Meningkatkan Kepedulian Masyarakat terhadap Budaya	Persentase Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi	(Jumlah nilai-nilai tradisi yang dilestarikan dibagi dengan Jumlah nilai-nilai tradisi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara) x 100%	Dinas Pariwisata
		Persentase Pelestarian Warisan Budaya	(Jumlah warisan budaya yang dilestarikan dibagi dengan Jumlah warisan budaya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara) x 100%	Dinas Pariwisata

		Pelestarian Cagar Budaya	(Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi dengan jumlah cagar budaya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara) x 100%	Dinas Pariwisata
		Persentase Kelompok Kesenian yang aktif	(Jumlah kelompok kesenian yang aktif dibagi dengan Jumlah kelompok kesenian yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara) x 100%	Dinas Pariwisata

20.	Meningkatnya akses jaringan/ layanan komunikasi dan informatika, seni budaya dan olahraga bagi seluruh lapisan masyarakat	Tersedianya rehabilitasi prasarana olahraga	(jumlah prasarana olahraga yang direhabilitasi dibagi dengan jumlah prasarana yang ada) x 100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Terlaksananya pengadaan alat olahraga	(jumlah pengadaan alat olahraga dibagi dengan jumlah cabang olahraga yang ada) x 100%	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Berkembangnya kesenian dan budaya daerah	(jumlah kesenian dan budaya daerah yang dibina dibagi dengan kesenian dan budaya daerah yang ada) x 100%	Dinas Pariwisata
		Jumlah kerjasama di bidang pariwisata	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan di bidang Pariwisata per tahun	Dinas Pariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisata Tahun n dikurangi dengan jumlah wisatawan n-1 x 100%	Dinas Pariwisata

		Tersedianya informasi sarana	jumlah prasarana olahraga yang direhabilitasi dibagi dengan jumlah prasarana yang ada x 100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
--	--	------------------------------	--	---

		Tersebarluasnya berita untuk masyarakat	(jumlah prasarana olahraga yang direhabilitasi dibagi dengan jumlah prasarana yang ada) x 100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
		Terlaksananya penyebaran informasi tentang Kabupaten Tapanuli Utara melalui Media Elektronik	(jumlah prasarana olahraga yang direhabilitasi dibagi dengan jumlah prasarana yang ada) x 100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
		Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara terpadu	(jumlah prasarana olahraga yang direhabilitasi dibagi dengan jumlah prasarana yang ada) x 100%	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b

**KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

ALBOIN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI UTARA

Nomor : 53.1. Tahun 2016

Tanggal : 2016

Tentang : **INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA TAHUN 2016**

1. SEKRETARIAT DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	Sekretariat Daerah
		Persentase Kecamatan Berkineja Baik	Evaluasi Kinerja Camat	
		Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Ketentuan Kementerian PAN dan RB	
		% Satker yang telah menyusun dan menyampaikan LAKIP tepat waktu	(Jumlah satker yang menyampaikan LAKIP tepat waktu dibagi dengan jumlah satker) x 100%	
		Tingkat ketepatan waktu penyampaian LPJ & LPAJ & LAKIP Pemda	Tanggal penyerahan LPJ & LPAJ & LAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
		Opini Auditor BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda	Opini Auditor BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda	
2.	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi produk rancangan peraturan daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah	Prosentase rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penataan dalam penyusunan produk hukum daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase SKPD yang pengelolaan pelayanan publiknya baik	Jumlah SKPD yang memenuhi kriteria dibandingkan dengan jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Sekretariat Daerah
		Rata-rata IKM Tapanuli Utara	Jumlah Nilai IKM SKPD yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dibagi Jumlah SKPD yang melaksanakan survey	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
4.	Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan	Persentase SKPD yang melaksanakan Pengadaan Barang Jasa melalui ULP dan BIMRS	Jumlah SKPD yang menyusun RUP melaksanakan lelang melalui ULP dan BIMRS dibandingkan dengan seluruh SKPD di lingkungan	Sekretariat Daerah
5.	Terwujudnya struktur organisasi dan tatakerja (SOTK) Satker di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang efisien dan efektif	Persentase SOTK Satker yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai Visi dan Misi Pemda	Jumlah SOTK sesuai ketentuan yang berlaku	Sekretariat Daerah
		Persentase Satker yang sistem dan prosedur kerjanya telah disederhanakan	(Jumlah satker yang sistem dan prosedur kerjanya telah disederhanakan dibagi total satker)x 100%	
6.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan yang terbentuk berfungsi dengan efektif	(Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan yang terbentuk berfungsi dengan efektif dibagi dengan total Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan)x 100%	Sekretariat Daerah
		Persentase penggunaan media masukan yang telah dimanfaatkan masyarakat	(Jumlah penggunaan media masukan dibagi dengan total media masukan)x 100%	
7.	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama	Persentase penurunan jumlah potensi konflik suku, agama, ras, antar golongan (SARA)	(Jumlah konflik tahun lalu dikurangi dengan jumlah konflik tahun ini dibagi dengan jumlah konflik tahun lalu)x 100%	Sekretariat Daerah
		Persentase anggota majelis khusus pada setiap agama yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama	(Jumlah majelis khusus yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama dibagi dengan total majelis khusus)x 100%	

2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatkan persentase kelulusan	Tingkat kelulusan siswa SD/MI	(Jumlah siswa SD/MI yang lulus dibagi dengan peserta ujian)x 100%	Dinas Pendidikan
		Tingkat kelulusan siswa SMP/MTs	(Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus dibagi dengan peserta ujian)x 100%	
		Tingkat kelulusan siswa SMA/MA	(Jumlah siswa SMA/MA yang lulus dibagi dengan peserta ujian)x 100%	
		Hasil nilai rata - rata UASBN SD/MI	Nilai UASBN SD/MI dibagi dengan jumlah peserta ujian	
		Hasil nilai rata - rata UN SMP/MTs	Nilai UN SMP/MTs dibagi dengan jumlah peserta ujian	
		Hasil nilai rata - rata UN SMA/MA	Nilai UN SMA/MA dibagi dengan jumlah peserta ujian	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		Hasil nilai rata - rata UN SMK	Nilai UN SMK dibagi dengan jumlah peserta ujian	
2.	Meningkat kualitas dan ketersediaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan	Jumlah guru yang berkualifikasi S1	Jumlah guru yang berkualifikasi S1	
		Jumlah guru Pembina Labor Sains SMA	Jumlah guru Pembina Labor Sains SMA	
		Jumlah guru Budaya Melayu SMA/SMK	Jumlah guru Budaya Melayu SMA/SMK	
		Jumlah guru penyusun/pengembang Kurikulum	Jumlah guru penyusun/pengembang Kurikulum	
		Jumlah guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	Jumlah guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	
3.	Menurunkan angka anak putus sekolah	Jumlah peserta Paket A setara SD	Jumlah peserta Paket A setara SD	
		Jumlah peserta Paket B setara SMP	Jumlah peserta Paket B setara SMP	
		Jumlah peserta Paket C setara SMA	Jumlah peserta Paket C setara SMA	
4.	Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pendidikan	Jumlah gedung sekolah, ruang kelas dan tingkat daya tampung SD	Jumlah gedung sekolah, ruang kelas dan tingkat daya tampung SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah ruang kelas dan tingkat daya tampung SMP	Jumlah ruang kelas dan tingkat daya tampung SMP	
		Jumlah ruang kelas dan tingkat daya tampung SMA	Jumlah ruang kelas dan tingkat daya tampung SMA	
		Jumlah gedung sekolah, ruang kelas dan tingkat daya tampung SMK	Jumlah gedung sekolah, ruang kelas dan tingkat daya tampung SMK	
		Jumlah ruang kelas SD yang direhab (KONDISI BAIK)	Jumlah ruang kelas SD yang direhab (KONDISI BAIK)	
		Jumlah ruang kelas SMP yang direhab	Jumlah ruang kelas SMP yang direhab	
		Jumlah ruang kelas SMA yang direhab	Jumlah ruang kelas SMA yang direhab	
		Jumlah ruang kelas SMK yang direhab	Jumlah ruang kelas SMK yang direhab	
		Jumlah Buku Rapor dan Buku Amaliyah Ramadhan SD dan SMP	Jumlah Buku Rapor dan Buku Amaliyah Ramadhan SD dan SMP	
		Jumlah Buku mata pelajaran pokok SMA (3 mata pelajaran)	Jumlah Buku mata pelajaran pokok SMA (3 mata pelajaran)	
		Jumlah sekolah yang memiliki Jaringan Listrik (SMK)	Jumlah sekolah yang memiliki Jaringan Listrik (SMK)	
		Jumlah Instruktur tenaga pendidik non formal	Jumlah Instruktur tenaga pendidik non formal	

3. DINAS PEKERJAAN UMUM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Terwujudnya pembangunan infrastruktur jalan di PPK	Tingkat minimal keterbangunan infrastruktur jalan PPK Kabupaten Tapanuli Utara	$(\text{Panjang Jalan terbangun dibagi dengan panjang jalan rencana pembangunan}) \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum
2.	Terwujudnya infrastruktur jalan yang berkualitas dan merata	Rasio minimal ruas jalan dalam kondisi baik	$(\text{Panjang jalan dikurangi panjang jalan dalam kondisi rusak dibagi dengan panjang jalan kabupaten Tapanuli Utara}) \times 100\%$	
		Indeks Aksesibilitas jalan	$(\text{Panjang jalan penghubung PK dibagi dengan panjang jalan Kabupaten Tapanuli Utara}) \times 100$	
		Tingkat deviasi maksimal pemerataan pemeliharaan jalan	$(\text{Porsi tertinggi dikurangi rata-rata dibagi dengan rata-rata}) \times 100$	

4. DINAS KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Keterangan
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk	$\text{Persentase dari jumlah balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita seluruhnya} \times 100\%$	Hasil penghitungan menggunakan kriteria pengukuran status gizi balita
		Persentase Bumil KEK	$\text{Jumlah Bumil KEK tanpa penyakit penyerta yang mendapat PMT dibagi jumlah Bumil Resti di suatu wilayah} \times 100\%$ dalam kurun waktu 1 tahun	Laporan dari masing-masing pengelola program dan kegiatan
		Angka Kematian Ibu	$\text{Jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, masa nifas dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang sama} \times 100.000 \text{ KH}$	Cakupan penurunan jumlah kematian ibu karena kehamilan
		Angka Kematian Bayi	$\text{Jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang sama} \times 1.000 \text{ KH}$	Cakupan penurunan jumlah kematian bayi
2.	Menurunkan angka kesakitan	Demam Berdarah Dengue	Demam Berdarah Dengue	Laporan Bulanan
		IR 20/100.000 jumlah penduduk x 100%	$\text{IR 20/100.000 jumlah penduduk} \times 100\%$	Laporan Bulanan
		HIV & AIDS	HIV & AIDS	Laporan Bulanan
		Prevalensi 315 /100.000 Jumlah Penduduk x 100%	$\text{Prevalensi 315 /100.000 Jumlah Penduduk} \times 100\%$	Laporan Bulanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Keterangan
3.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan	Jumlah Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	Jumlah Penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	Laporan Bulanan
		Jumlah diagnosa kesehatan cepat, tepat, akurat	Jumlah diagnosa kesehatan 65% cepat, tepat, akurat	Laporan Bulanan
4.	Meningkatnya PHBS	Presentase Lingkungan sehat	Persentase lingkungan sehat dalam satu wilayah dibagi dengan total wilayah	Laporan Bulanan
		Presentase masyarakat Berprilaku Sehat	Persentase masyarakat berperilaku sehat dalam satu wilayah dibagi dengan total wilayah	Laporan Bulanan

5. DINAS KEHUTANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya penanganan kasus-kasus endemik dibidang Pertanian, Perikanan dan kehutanan	Jumlah kasus-kasus serangan endemik yang dapat diatasi	Jumlah kasus-kasus serangan endemik yang dapat diatasi	Laporan Kecamatan dan Kelurahan
2.	Meningkatnya penanganan kasus-kasus endemik dibidang kehutanan	Jumlah kasus-kasus serangan endemik yang dapat diatasi	Jumlah kasus-kasus serangan endemik yang dapat diatasi	Laporan Kecamatan dan Kelurahan
3.	Terciptanya keserasian kebijakan di bidang pertanian, Perikanan dan kehutanan	Jumlah kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.	Jumlah kebijakan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.	Laporan bulanan kasus penyakit endemik.
		Jumlah perizinan dibidang Kehutanan (Kayu rakyat, SKAU, RBI, SHU)	Jumlah perizinan dibidang Kehutanan (Kayu rakyat, SKAU, RBI, SHU)	Peraturan/kebijakan dibidang perikanan
4.	Peningkatan PAD dari sektor kehutanan	Jumlah peningkatan PAD dari sektor Pertanian	Jumlah peningkatan PAD dari sektor Pertanian	Laporan Bulanan Perda No. ...
5.	Terwujudnya Industri Kehutanan Peredaran Hasil Hutan dan Pengelolaan Sumber Daya Kehutanan yang tertib dan terkendali	Jumlah Peningkatan Lahan Hutan Kota	Jumlah Peningkatan Lahan Hutan Kota	Laporan Bulanan
		Jumlah Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Jumlah Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	

6. DINAS PARIWISATA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya pelestarian dan	Jumlah even tradisional seni dan budaya batak	Jumlah even tradisional seni dan budaya melayu	Laporan Pelaksanaan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	pengembangan budaya dan kesenian daerah	Jumlah pagelaran seni	Jumlah pagelaran seni	Laporan Penyelenggaraan pagelaran seni
		Jumlah benda-benda seni dan sejarah Pemda yang dilestarikan	Jumlah benda-benda seni dan sejarah Pemda yang dilestarikan	Sejarah survei bidang sejarah dan kepurbakalaan
2.	Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah peningkatan bangunan sarana dan prasarana objek wisata Pemda	Jumlah peningkatan bangunan sarana dan prasarana objek wisata Pemda	Data pembangunan objek wisata Pemda
		Jumlah usaha pariwisata yang memiliki izin	Jumlah usaha pariwisata yang memiliki izin	Monitoring dan Ev.perizinan usaha pariwisata Pemda
3.	Peningkatan kunjungan wisatawan ke Pemda	Jumlah kunjungan Wisatawan Manca Negara dan Wisatawan Nusantara	Jumlah kunjungan Wisatawan Manca Negara dan Wisatawan Nusantara	Kantor Imigrasi dan Distarduk Pemda
4.	Menciptakan masyarakat Pemda sadar wisata	Jumlah penyuluhan Sapta Pesona bagi pelaku pariwisata yang dilaksanakan	Jumlah penyuluhan Sapta Pesona bagi pelaku pariwisata yang dilaksanakan	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan

7. DINAS CIPTA KARYA DAN PERUMAHAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	Luas kawasan permukiman kumuh dibagi luas permukiman	Dinas Cipta Karya
		Persentase masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mendapat rumah murah	Persentase masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mendapat rumah murah dibagi demgam total masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Dinas Cipta Karya
		Persentase rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni yang dihuni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Dinas Cipta Karya
2.	Terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata	Jumlah Kepala Keluarga pada kawasan permukiman yang mempunyai sanitasi dan air bersih	Jumlah kepala keluarga masyarakat terlayani air bersih dibagi jumlah kepala keluarga se Kabupaten Tapanuli Utara	Dinas Cipta Karya
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang permukiman	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang permukiman	Dinas Cipta Karya

8. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap potensi bahan tambang, air bawah tanah, dan energi secara ekonomis	Persentase potensi bahan tambang yang dapat direalisasikan menjadi industri	Jumlah tambang yang direalisasikan dibagi dengan potensi tambang) x 100%	Dinas Pertambangan
2.	Meningkatnya pengusahaan pertambangan yang berwawasan lingkungan, keselamatan kerja serta konservasi mineral,	Persentase pengusahaan hutan pertambangan yang berwawasan lingkungan, keselamatan kerja serta konservasi mineral	(Jumlah pengusahaan hutan pertambangan yang berwawasan lingkungan, keselamatan kerja serta konservasi mineral dibagi dengan pengusahaan hutan pertambangan yang berwawasan lingkungan, keselamatan kerja serta konservasi mineral) x 100%	Dinas Pertambangan
3.	Meningkatnya ketersediaan tenaga listrik dan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.	Persentase ketersediaan tenaga listrik dan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat	(Jumlah ketersediaan tenaga listrik dan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dibagi dengan kebutuhan tenaga listrik) x 100%	Dinas Pertambangan

9. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi yang aktif	(Jumlah koperasi yang aktif di wilayah kabupaten Tapanuli Utara dibagi dengan jumlah koperasi) x 100%	Dinas Koperasi dan UKM
		Persentase Koperasi kategori sehat	(Jumlah Koperasi kategori sehat dibagi dengan jumlah koperasi) x 100%	
		Persentase Koperasi aktif yang telah membagi SHU	(Jumlah Koperasi aktif yang telah membagi SHU dibagi dengan jumlah koperasi) x 100%	
2.	Meningkatnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mandiri dan produktif	Persentase tingkat pertumbuhan UMKM	Persentase tingkat pertumbuhan UMKM	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan BPS
		Persentase peningkatan omzet per unit UMKM	Persentase peningkatan omzet per unit UMKM	Lembaga Bantuan Keuangan (Bank/Non Bank)
		Persentase peningkatan penjualan produk UMKM	Persentase peningkatan penjualan produk UMKM	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		Rasio usaha mikro terhadap UKM	Rasio usaha mikro terhadap UKM	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
3.	Meningkatnya pengetahuan pengelola koperasi dan pelaku UMKM	Persentase Koperasi dan UMKM yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah manajemen usaha	Persentase Koperasi dan UMKM yang mampu mengelola usaha sesuai kaidah manajemen usaha	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
4.	Meningkatnya bantuan perkuatan permodalan bagi Koperasi dan pelaku UMKM	Rasio kecukupan modal sendiri bagi koperasi dan pelaku UMKM	Rasio kecukupan modal sendiri bagi koperasi dan pelaku UMKM	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan
5.	Peningkatan mutu melalui sistem permodalan, kemitraan dan peningkatan IPTEK pelaku usaha bidang industri dan perdagangan	% tingkat pertumbuhan investasi bidang industri dan perdagangan	(Jumlah pertumbuhan investasi bidang industri dan perdagangan tahun ini dibagi dengan Jumlah pertumbuhan investasi bidang industri dan perdagangan tahun lalu)x 100%	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag • Kadinda Pemda • Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
		% peningkatan jumlah IKM bekerjasama dengan perbankan	(Jumlah IKM bekerjasama dengan perbankan dikurangi dengan tahun lalu dibagi dengan total IKM tahun lalu)x 100%	
		% peningkatan jumlah IKM beralih dari manual ke mekanisasi	(Jumlah IKM beralih ke mekanisasi tahun ini dikurangi dengan tahun lalu dibagi dengan total tahun lalu)x 100%	
6.	Meningkatkan ekspor dan pengendalian impor	Persentase peningkatan nilai devisa ekspor	(Jumlah nilai ekspor tahun ini dikurangi dengan nilai ekspor tahun lalu dibagi dengan ekspor tahun lalu) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> • BPMP Pemda • Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

10. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Produktivitas Peternakan	Produktivitas ternak ayam	Jumlah produksi ternak ayam dibagi dengan populasi ternak ayam	Laporan Hasil Monev dan evaluasi , laporan statistik
		Produktivitas ternak sapi	Jumlah produksi ternak sapi dibagi dengan populasi ternak sapi	
		Produktivitas ternak kambing	Jumlah produksi ternak kambing dibagi dengan populasi ternak kambing	
		Produktivitas ternak babi	Jumlah produksi ternak babi dibagi dengan populasi ternak babi	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		Jumlah produksi daging ternak	Jumlah produksi daging ternak selama setahun	
		Tingkat distribusi bibit ternak unggul kepada peternak	(Distribusi bibit ternak unggul kepada peternak dibagi dengan jumlah peternak)	
		Produktivitas ternak itik	Jumlah produksi ternak itik dibagi dengan populasi ternak itik	
		Persentase PAD dari sektor Peternakan	(Jumlah PAD dari sektor Peternakan dibagi dengan total produksi peternakan) x 100%	
2.	Meningkatnya penanganan kasus-kasus endemik dibidang Peternakan	Jumlah kasus-kasus serangan endemik yang dapat diatasi	Jumlah kasus-kasus serangan endemik yang dapat diatasi	Laporan Kecamatan dan Kelurahan Laporan bulanan kasus penyakit endemik
3.	Terciptanya keserasian kebijakan di bidang pertanian, Perikanan dan peternakan	Jumlah kebijakan di bidang Peternakan	Jumlah kebijakan di bidang Peternakan yang diterbitkan	Peraturan/kebijakan dibidang peternakan
4.	Peningkatan Hasil Perikanan	Jumlah peningkatan Produksi Benih Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan tahun ini dikurangi dengan produksi tahun lalu	Laporan Hasil Monev dan, laporan statistik
		Jumlah peningkatan Produksi Budidaya Ikan	Jumlah Produksi Budidaya Ikan tahun ini dikurangi dengan produksi tahun lalu	
5	Meningkatnya penanganan kasus-kasus endemik dibidang Perikanan	Jumlah kasus-kasus serangan endemik yang dapat diatasi	Jumlah kasus-kasus serangan endemik yang dapat diatasi	Laporan bulanan kasus penyakit endemik
6	Terciptanya keserasian kebijakan di bidang Perikanan	Jumlah Perda di bidang Perikanan yang ditetapkan	Jumlah Perda di bidang Perikanan yang ditetapkan	Peraturan/kebijakan dibidang perikanan
7	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Perikanan	Jumlah peningkatan PAD dari sektor Perikanan	Jumlah peningkatan PAD dari sektor Perikanan	Laporan Bulanan
8	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Laporan Bulanan

11. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Peningkatan Hasil Pertanian	Jumlah peningkatan produktivitas pertanian	Jumlah produksi pertanian tahun lalu dikurangi produksi pertanian tahun ini	Laporan Hasil Monev dan laporan statistik
2.	Terciptanya keserasian kebijakan di bidang pertanian	Jumlah kebijakan yang dihasilkan di bidang Pertanian,	Jumlah kebijakan yang dihasilkan di bidang Pertanian,	Peraturan/kebijakan dibidang pertanian
3.	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertanian	Jumlah peningkatan PAD dari sektor Pertanian	Jumlah PAD dari sektor Pertanian tahun lalu dikurangi dengan Jumlah PAD dari sektor Pertanian tahun ini	Laporan Bulanan
4.	Meningkatnya Pembangunan Sektor Pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Laporan Bulanan
		PDRB dari sektor pertanian	PDRB dari sektor pertanian	
		Tingkat pertumbuhan sektor pertanian	Tingkat pertumbuhan sektor pertanian	
		Tingkat penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian	Tingkat penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian	
5.	Meningkatnya Agrobisnis	Jumlah perusahaan/pengusaha yang berinvestasi di bidang agrobisnis	Jumlah perusahaan/pengusaha yang berinvestasi di bidang agrobisnis	
		Nilai investasi bidang agrobisnis	Nilai investasi bidang agrobisnis	Laporan Bulanan
6.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Rata-rata pendapatan per kapita petani	Rata-rata pendapatan per kapita petani	Laporan Bulanan
		Rata-rata pemilikan lahan per petani	Rata-rata pemilikan lahan per petani	
		Rasio petani yang memiliki dan mengolah lahan sendiri lebih dari 1Ha	Rasio petani yang memiliki dan mengolah lahan sendiri lebih dari 1Ha	

12. DINAS PERHUBUNGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya volume dan ketertiban arus lalu lintas penumpang/ barang	Persentase peningkatan Jumlah arus penumpang angkutan umum (darat, laut, udara)	(Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun ini dikurangi dengan jumlah arus penumpang angkutan umum tahun lalu dibagi dengan jumlah arus penumpang tahun lalu)x 100%	Laporan Bulanan
		Persentase peningkatan jumlah arus angkutan barang melalui dermaga/bandara/terminal	(Jumlah arus penumpang angkutan barang tahun ini dikurangi dengan jumlah arus penumpang angkutan barang tahun lalu dibagi dengan jumlah arus penumpang tahun lalu)x 100%	Laporan Bulanan
		Persentase kendaraan angkutan umum yang beroperasi secara legal	(Jumlah angkutan umum yang beroperasi secara legal dibagi dengan jumlah angkutan umum yang beroperasi) x 100%	Laporan Bulanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		Persentase jumlah kendaraan umum yang telah uji kelaikan (Uji Kir)	(Jumlah angkutan umum yang telah uji kelaikan (uji Kir) dibagi dengan jumlah kendaraan umum) x 100%	Laporan Bulanan
		Persentase jumlah operator angkutan umum yang mentaati peraturan perundangan transportasi	(Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun ini dikurangi dengan jumlah arus penumpang angkutan umum tahun lalu dibagi dengan jumlah arus penumpang tahun lalu)x 100%	Laporan Bulanan
2.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan arus lalu lintas penumpang/barang	Persentase pelayanan perizinan dan pengujian kendaraan bermotor yang diselesaikan sesuai standar pelayanan (SPM)	(Jumlah pelayanan perijinan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan dibagi dengan jumlah pelayanan perijinan yang terdaftar)x 100%	Laporan Bulanan
			(Jumlah pelayanan perijinan yang diselesaikan sesuai standar pelayanan dibagi dengan jumlah pelayanan perijinan yang terdaftar)x 100%	Laporan Bulanan
3.	Meningkatnya sistem manajemen transportasi dan sarana perhubungan	Persentase peningkatan ketepatan implementasi traffic management	(Tingkat ketepatan implementasi traffic management tahun lalu dikurangi dengan Tingkat ketepatan implementasi traffic management tahun ini)x 100%	Laporan Bulanan
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	(jumlah pelanggaran tahun lalu dikurangi dengan pelanggaran tahun ini dibagi dengan jumlah pelanggaran tahun lalu)x 100%	Laporan Bulanan
		Persentase kapasitas dermaga/pelabuhan/terminal	(Kapasitas dermaga/pelabuhan/terminal dibagi dengan jumlah dermaga/pelabuhan/terminal)x 100%	Laporan Bulanan
		Persentase peningkatan kapasitas dermaga/pelabuhan/terminal	(Kapasitas dermaga/pelabuhan/terminal tahun lalu dikurangi Kapasitas dermaga/pelabuhan/terminal tahun ini)x 100%	Laporan Bulanan

13. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Keterangan
1.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Penganggur Dibanding Dengan Jumlah Angkatan Kerja	Dinas Sosial Nakertrans
2.	Meningkatnya keterampilan dan kompetensi pencari kerja	Persentase tenaga kerja yang kompeten	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Lulusan SMK ke atas ditambah hasil pelaksanaan UJK Dinas Sosial Nakertrans	Dinas Sosial Nakertrans
3.	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah Lowongan Pekerjaan Baru	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar	Dinas Sosial Nakertrans
		Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang ditempatkan	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Dibnading dengan Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	Dinas Sosial Nakertrans
3.		Jumlah Bursa Kerja dan Pasar Kerja	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Sosial Nakertrans

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Keterangan
	Meningkatnya perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Perusahaan di Wilayah Pemda, Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta	Dinas Sosial Nakertrans
4.	Meningkatnya Pengembangan sistim hubungan industrial dan penyelesaian masalah ketenagakerjaan	Persentase perusahaan/ pengusaha yang mentaati peraturan/kebijakan ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang mentaati peraturan/kebijakan ketenagakerjaan dibandingkan dengan total perusahaan	Dinas Sosial Nakertrans
		% Penyelesaian Perselisihan perburuhan/ hubungan Industrial	Jumlah kasus yang masuk dibandingkan dengan penyelesaiannya	Dinas Sosial Nakertrans
		Jumlah Penurunan tingkat pelanggaran normatif di perusahaan	Perusahaan di Wilayah Pemda	Dinas Sosial Nakertrans
		Jumlah kasus pelanggaran tenaga kerja yang ditindaklanjuti	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Dinas Sosial Nakertrans
		Persentase Penurunan angka kecelakaan kerja	Disnaker Pemda	Dinas Sosial Nakertrans
5.	Meningkatnya Minat Bertransmigrasi	Jumlah calon transmigran trespeseleksi	Jumlah calon transmigran trespeseleksi	Dinas Sosial Nakertrans
6.	Meningkatnya partisipasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Prosentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	(Jumlah TKSK yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS dibagi dengan jumlah seluruhnya TKSK yang)x100%	Dinas Sosial Nakertrans
7.	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang cacat	Prosentase penyandang cacat yang mampu hidup mandiri	(Jumlah penyandang cacat yang mampu mandiri dibagi dengan jumlah seluruh penyandang cacat yang ada) x 100%.	Dinas Sosial Nakertrans
8.	Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (WTS, gepeng dan anak jalanan)	Prosentase gelandangan atau pengemis yang mengalami perubahan perilaku	(Jumlah gelandangan atau pengemis yang mengalami perubahan perilaku dibagi dengan total seluruh gelandangan atau pengemis yang ada di jalanan)x 100%	Dinas Sosial Nakertrans
		Prosentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	(WTS yang mengalami perubahan perilaku dibagi dengan jumlah total WTS yang ada) x 100%	Dinas Sosial Nakertrans
		Prosentase anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku	(Anak jalanan yang mengalami perubahan perilaku dibagi dengan jumlah total anak jalanan yang ada) x 100%	Dinas Sosial Nakertrans
9.	Meningkatnya kesempatan berusaha di sektor industri dan perdagangan	% penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan perdagangan	(Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri dan perdagangan dibagi dengan total pencari kerja)x 100%	Dinas Tenaga Kerja Pemda

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Keterangan
		Persentase peningkatan PAD dari sektor industri dan perdagangan	(Jumlah PAD dari sektor industri dan perdaganga tahun ini dibagi dengan Jumlah PAD dari sektor industri dan perdaganga tahun lalu)x 100%	

14. DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	Tanggal penyampaian RAPBD-Tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan KUA/PPA	Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah
		Prosentase realisasi terhadap anggaran pendapatan yang telah ditetapkan	(Realisasi Pendapatan/Anggaran Pendapatan)x100%	
		Prosentase realisasi terhadap anggaran belanja yang telah ditetapkan	(Realisasi Belanja/Anggaran Pendapatan)x100%	
2.	Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan	Prosentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	(Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu/seluruh jumlah SP2D yang diterbitkan)x100%	Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah
3.	Meninmgkatnya penatausahaan aset sesuai peraturan perundangan	Prosentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca	(Jumlah rincian total BMD di Simda Barang/Data Asety Pada Neraca Pemerintah Kabupaten di Simda Keuangan)x100%	Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah
		Prosentase tanah milik pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersertifikat	(Luas tanah milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara bersertifikat/seluruh luas tanah yang dimiliki dikuasai Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara)x100%.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah
4.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menjadi kategori/nilai yang diperoleh	Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah
5.	Meningkatnya penerimaan Pajak,	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	(Jumlah penerimaan pajak tahun lalu dikurangi dengan penerimaan pajak tahun ini)x 100%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi	$(\text{Jumlah penerimaan retribusi tahun lalu dikurangi dengan penerimaan retribusi tahun ini}) \times 100\%$	Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah
		Persentase peningkatan penerimaan Pendapatan Lain-lain yang sah	$(\text{Jumlah penerimaan pendapatan lain-lain yang sah tahun lalu dikurangi dengan penerimaan pendapatan lain-lain yang sah tahun ini}) \times 100\%$	

15. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya akurasi Data Base kependudukan Pemda	Tingkat akurasi data base kependudukan	Tingkat akurasi dihitung dengan menetapkan skala baik, sedang dan cukup	Laporan Kependudukan dari Kecamatan
2.	Peningkatan kualitas pelayanan dibidang pendaftaran penduduk	Rasio penduduk memiliki KTP	$(\text{Jumlah KTP yang diterbitkan dibagi dengan jumlah penduduk wajib KTP}) \times 100\%$	Laporan Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Persentase pasangan yang ber akte nikah	$(\text{Jumlah pasangan yang ber akte nikah dibagi dengan pasangan yang telah menikah}) \times 100\%$	
		Persentase jumlah pelayanan di bidang pendaftaran penduduk yang telah sesuai dengan standar pelayanan	$(\text{Jumlah pelayanan sesuai standar pelayanan dibagi dengan jumlah pendaftaran pelayanan}) \times 100\%$	
3.	Peningkatan kualitas pelayanan dibidang Pencatatan Sipil	Rasio bayi yang ber akte kelahiran	Jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran dibagi dengan total bayi	Laporan Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Sipil
		Persentase jumlah pelayanan di bidang pencatatan sipil yang telah sesuai dengan standar pelayanan	$(\text{Jumlah pelayanan di bidang pencatatan sipil yang telah sesuai dengan standar pelayanan dibagi dengan total pelayanan}) \times 100\%$	

16. DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.		Jumlah ruas jalan utama kota kategori bersih	Jumlah ruas jalan utama kota kategori bersih	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	Meningkatnya kualitas kebersihan kabupaten dan pengelolaan sampah akhir	Jumlah Penghargaan Kebersihan tingkat Propinsi dan tingkat Nasional	Jumlah Penghargaan Kebersihan tingkat Propinsi dan tingkat Nasional	Laporan monitoring Dinas Pasar dan kebersihan
		Jumlah Pengelolaan sampah TPA ramah lingkungan	Jumlah Pengelolaan sampah TPA ramah lingkungan	
2.	Meningkatnya PAD dari pengelolaan pasar	Persentase kenaikan PAD	(Jumlah PAD dari pengelolaan pasar tahun ini dikurangi PAD dari pengelolaan pasar tahun lalu) x 100%	Laporan monitoring Dinas Pasar dan kebersihan
		Jumlah Pasar yang dikelola dengan baik	Jumlah Pasar yang dikelola dengan baik	

17. BAPPEDA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan (RKPD, Penja) tepat waktu	Dokumen perencanaan (RKPD, Penja) tepat waktu	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Dokumen laporan monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	Dokumen laporan monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	
2	Meningkatnya keselarasan Perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan SKPD	Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	(% keselarasan sasaran+keselarasan indikator sasaran+keselarasan target sasaran+keselarasan program+keselarasan indikator program+keselarasan target program)/6 (Jumlah sasaran dalam Renstra yang selaras dengan RPJMD dibagi total sasaran dalam RPJMD) x 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			(Jumlah indikator sasaran dalam Renstra yang selaras dengan RPJMD dibagi total indikator sasaran dalam RPJMD) x 100%	
			(Jumlah target sasaran dalam Renstra yang selaras dengan RPJMD dibagi total target sasaran dalam RPJMD) x 100%	
			(Jumlah program dalam Renstra yang selaras dengan RPJMD dibagi total program dalam RPJMD) x 100%	
			(Jumlah indikator program dalam Renstra yang selaras dengan RPJMD dibagi total indikator program dalam RPJMD) x 100%	
			(Jumlah target program dalam Renstra yang selaras dengan RPJMD dibagi total target program dalam RPJMD) x 100%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	$(\% \text{ keselarasan program} + \text{keselarasan indikator program} + \text{keselarasan target program} + \text{keselarasan kegiatan} + \text{keselarasan indikator kegiatan} + \text{keselarasan target kegiatan}) / 6$ (Jumlah program dalam Renja yang selaras dengan RKPD dibagi total program dalam RKPD) x 100%	
			(Jumlah indikator program dalam Renja yang selaras dengan RKPD dibagi total indikator program dalam RKPD) x 100%	
			(Jumlah target program dalam Renja yang selaras dengan RKPD dibagi total target program dalam RKPD) x 100%	
			(Jumlah kegiatan dalam Renja yang selaras dengan RKPD dibagi total kegiatan dalam RKPD) x 100%	
			(Jumlah indikator kegiatan dalam Renja yang selaras dengan RKPD dibagi total indikator kegiatan dalam RKPD) x 100%	
			(Jumlah target kegiatan dalam Renja yang selaras dengan RKPD dibagi total target kegiatan dalam RKPD) x 100%	
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Jumlah usulan masyarakat dalam musrembang yang diakomdir dalam RKPD	Jumlah usulan masyarakat dalam musrembang yang diakomdir dalam RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase belanja langsung RKPD yang mengakomodir usulan masyarakat	(Jumlah alokasi anggaran untuk kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dibagi dengan total pagu belanja langsung RKPD) x 100%	
4.	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan RKPD dengan RPJMD	$(\% \text{ keselarasan sasaran} + \text{keselarasan indikator sasaran} + \text{keselarasan target sasaran} + \text{keselarasan program} + \text{keselarasan indikator program} + \text{keselarasan indikator program} + \text{keselarasan target program}) / 6$ (Jumlah sasaran dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD dibagi total sasaran dalam RPJMD) x 100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			(Jumlah indikator sasaran dalam RKPD yang selaras dengan indikator sasaran dalam RPJMD dibagi total indikator sasaran dalam RPJMD) x 100%	
			(Jumlah target sasaran dalam RKPD yang selaras dengan target sasaran dalam RPJMD dibagi total target sasaran dalam RPJMD) x 100%	
			(Jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD dibagi total program dalam RPJMD) x 100%	
			(Jumlah indikator program program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD dibagi total indikator program dalam RPJMD) x 100%	
			(Jumlah target program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD dibagi total target program dalam RPJMD) x 100%	

18. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan anak pada tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga dan organisasi perempuan dan anak yang dapat dibina pada tingkat Kecamatan.	Laporan lembaga/ organisasi perempuan dan anak	
		Jumlah perempuan perdesaan terampil bidang usaha ekonomi produktif		
2.	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam wawasan gender	% perempuan yang memiliki wawasan gender	Laporan rapat/pertemuan lembaga/organisasi pemberdayaan perempuan dan anak.	
3.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dalam kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Trafficking dan Pekerja Anak	Jumlah pendampingan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Trafficking dan Pekerja Anak	Daftar pendamping kasus KDRT, trafficking dan PPTA	
4.	Meningkatnya lembaga/badan usaha ekonomi masyarakat yang memanfaatkan program PPD	Jumlah lembaga/badan usaha ekonomi masyarakat pemanfaat program PPD yang dibina.	Laporan PD dan KORDA	
5.	Peningkatan permodalan ekonomi Masyarakat lapisan bawah	Persentase Kelompok atau masyarakat ekonomi lapisan bawah yang berhasil memanfaatkan modal (UEK-SP dan Rumah Tangga Miskin)	Laporan KORDA	
6.	Meningkatnya kemandirian pemerintahan desa	Jumlah desa yang mandiri	Jumlah desa yang mandiri	
		Jumlah Tokoh masyarakat desa yang profesional	Jumlah Tokoh masyarakat desa yang profesional	
		Jumlah pemerintahan desa dengan kategori baik	Jumlah pemerintahan desa dengan kategori baik	
7.	Meningkatnya kemandirian masyarakat	Jumlah kelompok masyarakat yang mandiri	Jumlah kelompok masyarakat yang mandiri	

19. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Peningkatan system penyuluhan pertanian secara profesional dan berkelanjutan	Jumlah peningkatan produksi dan produktifitas/ Ha setelah di lakukan penyuluhan	Jumlah produksi pertanian tahun ini dikurangi dengan produksi pertanian tahun lalu yang komoditinya mendapat penyuluhan pertanian	Biro data statistik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		Persentase peningkatan pendapatan petani setelah dilaksanakan penyuluhan	(Jumlah pendapatan petani tahun ini dikurangi dengan pendapatan petani tahun lalu yang menerima penyuluhan pertanian) x 100%	Laporan bulanan, triwulan UPTB dan penyuluh pertanian lapangan (PPL)
2.	Meningkatkan Sumber Daya dan Kinerja Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, magang/studi banding dll.	Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang terampil	Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang terampil yang dihasilkan selama setahun	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
		Jumlah tenaga penyuluh perikanan terampil	Jumlah tenaga penyuluh perikanan terampil yang dihasilkan selama setahun	
		Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang terampil	Jumlah tenaga penyuluh kehutanan yang terampil yang dihasilkan selama setahun	
3.	Meningkatnya alih teknologi atau transformasi teknologi melalui berbagai media penyuluhan	Jumlah alih teknologi pertanian	Jumlah komoditi pertanian yang telah mengimplementasikan alih teknologi pertanian	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
4.	Meningkatnya Penerapan Teknologi berproduksi yaitu penggunaan sarana produksi berupa pupuk berimbang, Benih Bersertifikat, Obat-obatan dan Penggunaan Alsintan.	Jumlah Penerapan Teknologi berproduksi yaitu penggunaan sarana produksi berupa pupuk berimbang,	Jumlah Penerapan Teknologi berproduksi yaitu penggunaan sarana produksi berupa pupuk berimbang,	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
		Jumlah Penerapan Teknologi berproduksi yaitu Benih Bersertifikat.	Jumlah Penerapan Teknologi berproduksi yaitu Benih Bersertifikat.	
		Jumlah Penerapan Teknologi berproduksi yaitu Obat-obatan	Jumlah Penerapan Teknologi berproduksi yaitu Obat-obatan	
		Jumlah Penerapan Teknologi berproduksi yaitu Penggunaan Alsintan	Jumlah Penerapan Teknologi berproduksi yaitu Penggunaan Alsintan	
6.	Meningkatnya kemitraan dalam rangka pemasaran hasil.	Jumlah Kemitraan dalam rangka pemasaran hasil pertanian	Jumlah Kemitraan dalam rangka pemasaran hasil pertanian	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

20. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase kenaikan pangkat tepat waktu	Jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai	BKD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	administrasi kepegawaian	Persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu	Jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai	
		Persentase pegawai pensiun tepat waktu	Jumlah usulan pensiun pegawai selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan pensiun pegawai	
2.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (SDM Birokrasi)	Persentase kesesuaian pejabat struktural yang memenuhi standard kompetensi dengan kualifikasi yang dibutuhkan	Jumlah pejabat struktural yang memenuhi syarat kompetensi	BKD
		Persentase formasi PNS yang telah terpenuhi	Jumlah formasi PNS yang telah terpenuhi	
		Persentase tenaga teknis fungsional yang memenuhi standar sertifikasi	Jumlah pejabat fungsional yang memenuhi syarat kompetensi	
3.	Meningkatnya disiplin pegawai	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai	(Jumlah kasus yang ditangani dibagi dengan jumlah kasus yang terjadi (yang dilaporkan))x 100%	Laporan Penegakan Disiplin Daftar Kehadiran
		Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin	(Jumlah SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin pegawai dibagi dengan jumlah SKPD)x 100%	
		Persentase tingkat kehadiran pegawai	Persentase kehadiran PNS	
3.	Meningkatnya kinerja BKD	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan BKD	Hasil survey/kuesioner terhadap pengguna pelayanan (PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara)	
		Nilai Evaluasi Kinerja BKD	Nilai Evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP BKD	

21. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana	Jumlah masyarakat (kelompok masyarakat) yang memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana	Jumlah masyarakat (kelompok masyarakat) yang memiliki kemampuan dalam menghadapi, yang telah memiliki sertifikasi atau mengikuti kegiatan kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencan Daerah
		Jumlah kelompok masyarakat yang dapat melakukan upaya-upaya pencegahan bencana	Jumlah kelompok masyarakat yang dapat melakukan upaya-upaya pencegahan bencana (sebelumnya mendapat pelatihan pencegahan kebencanaan)	
		Jumlah Desa Siaga Bencana	Jumlah Desa yang memenuhi syarat Desa Bencana	
2.		Jumlah Lokasi yang berfungsi kembali seperti semula	Jumlah Lokasi yang direhabilitasi	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	Meningkatnya rehabilitasi pasca bencana	Jumlah masyarakat yang dalam pemulihan	Jumlah masyarakat yang dalam pemulihan	Badan Penanggulangan Bencan Daerah
		Jumlah kebijakan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah kebijakan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi	
		Jumlah kerjasama dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah kerjasama dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi	
		Jumlah lokasi bencana yang direkonstruksi	Jumlah lokasi bencana yang direkonstruksi	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan penanganan bencana	Jumlah Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana	Jumlah Kebijakan Bidang Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencan Daerah
		Jumlah kerjasama pelayanan kebencanaan dengan instansi terkait	Jumlah kerjasama pelayanan kebencanaan dengan instansi terkait	

22. BADAN KELUARGA BERENCANA DAN KEPENDUDUKAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera	Persentase Keluarga Pra Sejahtera menjadi Keluarga Sejahtera	$(\text{Jumlah Keluarga Sejahtera} / \text{Jumlah Keluarga Pra Sejahtera}) \times 100\%$	Badan KB dan PKS
2	Meningkatnya lembaga/badan usaha ekonomi masyarakat yang memanfaatkan program PPD	Jumlah lembaga/badan usaha ekonomi masyarakat pemanfaat program PPD yang dibina.	Laporan PD dan KORDA	Badan KB dan PKS
3	Peningkatan permodalan ekonomi Masyarakat lapisan bawah	Persentase Kelompok atau masyarakat ekonomi lapisan bawah yang berhasil memanfaatkan modal (UEK-SP dan Rumah Tangga Miskin)	Laporan KORDA	Badan KB dan PKS
4	Peningkatan kualitas pelayanan Akseptor KB	Jumlah Akseptor KB Baru dibanding jumlah Sisa PUS.	Laporan Akseptor KB Baru	Badan KB dan PKS
		Prosentase Akseptor KB Aktif terhadap PUS.	Laporan Akseptor KB Aktif	

23. INSPEKTORAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Peningkatan kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis	Jumlah temuan hasil audit reguler, APIP dan Eksternal yang ditindak lanjuti	Laporan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara
		Jumlah SKPD yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Jumlah Laporan keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	
		Jumlah Kasus-kasus khusus yang terselesaikan	Laporan hasil tindak lanjut	
		Jumlah pengembalian kerugian daerah ke Kas Daerah	Laporan hasil tindak lanjut	
2	Peningkatan akuntabilitas kinerja IPD yang handal	Persentase SKPD yang akuntabilitas kinerjanya kategori baik	Laporan hasil evaluasi LAKIP	Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara
3.	Meningkatnya implementasi SPIP	Persentase SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang	Jumlah SKPD yang telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di jajaran SKPD	Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi jumlah seluruh rekomndais dikalikan dengan seratus persen	Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara
5.	Meningkatnya tertib administrasi barang	Persentase SKPD yang tertib administrasi barang/aset daerah	Jumlah SKPD yang tidak mempunyai temuan adminstrasi barang/aset dibagi dengan jumlah seluruh SKPD dikali dengan seratus persen	Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	Persentase SKPD yang memilik nilai Evaluasi AKIP baik oleh Inspektorat	Jumlah SKPD yang nlai evaluasinya minimal CC dibagi dengan jumlah seluruh SKPD pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang dievaluasi dikali dengan seratus persen	Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara
7.	Meningkatnya aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Persentase aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki standar kompetensi	Jumlah APIP yang memiliki standar kompetensi dibagi dengan jumlah seluruh APIP Inspektorat dikali dengan seratus persen	Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara
8.	Meningkatnya kepuasan stakeholder	Persentase SKPD yang menyatakan puas atas layanan inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara	Jumlah SKPD yang menyatakan puas dibagi dengan jumlah seluruh SKPD dikali dengan seratus persen	Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		Persentase aduan masyarakat atas pelayanan publik yang ditindaklanjuti dalam 14 hari	14 hari dibagi jumlah aduan masyarakat atas layanan publik yang diterima Inspektorat dikali dengan seratus persen	

24. SEKRETARIAT DPRD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara	Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	Jumlah dewan yang puas dibagi dengan jumlah Anggota DPRD dikali dengan seratus persen	Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara
		Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	Rapat yang terlaksana tepat waktu dibagi dengan jumlah rapat yang terjadwalkan dikali dengan seratus persen	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan	Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat	Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti kepada dewan dibagi dengan jumlah aspirasi yang masuk dikali dengan seratus persen	Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Utara

25. KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat	Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	Jumlah pos kamling dibagi dengan jumlah yang seharusnya sesuai dengan ketentuan	Kantor Kesbang dan Linmas
		Persentase Penurunan konflik sosial masyarakat	$(\text{Jumlah konflik tahun lalu} - \text{jumlah konflik tahun ini}) \times 100\%$	
		Persentase jumlah demo masyarakat yang tertib	$(\text{Jumlah demo masyarakat yang tertib} / \text{jumlah demo dalam setahun}) \times 100\%$	
		Rasio linmas per 2.000 penduduk	Jumlah aparat linmas per 2.000 penduduk	
2.	Meningkatnya kesadaran berpolitik pada masing-masing partai politik daerah	Jumlah partai politik di wilayah kabupaten yang telah memenuhi ketentuan	Jumlah partai politik di wilayah kabupaten yang telah memenuhi ketentuan	Kantor Kesbang dan Linmas
		Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada	$(\text{Jumlah masyarakat yang berpa} / \text{Persentase Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada}) \times 100\%$	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
		Persentase Tingkat konflik anarkhis atas hasil pemilu/pilkada	Persentase Tingkat konflik anarkhis atas hasil pemilu/pilkada	
3.	Terwujudnya peran aktif, penguatan dan pemberdayaan Ormas dan LSM	Jumlah LSM atau Ormas yang memenuhi syarat (legal) dan ktif	Jumlah ormas yang terdaftar dan aktif	Kantor Kesbang dan Linmas

26. BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPT dalam melaksanakan tugas pelayanan perizinan dan non-perizinan	Jumlah pertambahan jenis perizinan dan non-perizinan yang didelegasikan kepada BPT	Jumlah jenis perizinan dan non-perizinan baru yang didelegasikan kepada BPT	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Jumlah Instansi teknis yang terkoneksi/online dengan BPT	Jumlah Instansi teknis yang terkoneksi/online dengan BPT dibandingkan dengan tahun lalu	
		Jumlah dan jenis pelayanan berstandar yang diberikan	Jumlah dan jenis pelayanan berstandar yang diberikan	
2.	Meningkatnya kecepatan, ketepatan dan kenyamanan dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variabel dengan total variabel yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Jumlah hari yang diperlukan untuk menerbitkan dokumen perizinan dan non-peizinan	Jumlah hari yang diperlukan mulai dari memasukkan dokumen perijinan dan non perijinan sampai dengan penerbitan dokumen perijinan dan non perijinan	
		Persentase layanan tepat waktu	(jumlah layanan yang diberikan dengan tepat waktu dibagi dengan jumlah layanan yang diberikan)x 100%	
		Persentase Berkurangnya jumlah pengaduan tentang mutu pelayanan BPT.	(Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan total pengaduan yang masuk)x 100%	
3.	Meningkatnya jumlah penerimaan daerah dari retribusi perizinan dan non-perizinan	Persentase peningkatan penerimaan daerah dari retribusi perizinan dan non-perizinan	(jumlah penerimaan daerah dari retribusi perijinan dan perijinan tahun ini dikurangi dengan penerimaan tahun lalu)x 100%	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

27. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Peningkatan ketertiban administrasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah	Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mencari arsip yang dibutuhkan	Total waktu yang dibutuhkan mencari arsip dibagi dengan total pencarian arsip	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Persentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku dibagi dengan total SKPD	
2.	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase Pemustaka pertahun	Jumlah pemustaka dibagi dengan jumlah penduduk usia 5-59 tahun dikali dengan seratus persen	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
3.	Meningkatnya kualitas perpustakaan kelurahan	Persentase perpustakaan kelurahan yang akti	Jumlah perpustakaan kelurahan yang aktif dibagi dengan total perpustakaan kelurahan dikali dengan seratus persen	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
4.	Meningkatnya keanekaragaman bahan pustaka	Jumlah koleksi bahan pustka	Akumulasi Jumlah koleksi bahan pustaka	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
5.	Meningkatnya Kualits Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layananan Perpustakaan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Permenpan Nomor 16 Tahun 2004) Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2014)	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layananan Kearsipan	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Permenpan Nomor 16 Tahun 2004) Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2014)	

28. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya ketertiban dalam pelaksanaan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum	Cakupan penyelesaian Penegakan Perda	Jumlah Penyelesaian pelanggaran perda perbub/jumlah pelanggaran perda perbub yang dilaporkan dikali dengan seratus persen	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase menurunnya pelanggaran ketertiban umum	(Jumlah pelanggaran ketertiban umum tahun lalu dikurangi dengan jumlah pelanggaran tahun ini) x 100%	
		Persentase zona merah tingkat kabupaten yang tertib	Jumlah zona merah tingkat kabupaten yang tertib/jumlah merah tingkat kabupaten dikali dengan seratus persen	
		Persentase kawasan bebas reklame yang tertib	Jumlah kawasan bebas reklamae yang tertib/jumlah kawasan bebas reklame dikali dengan seratus persen	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
2	Meningkatkan Penertiban dan Pengawasan	Jumlah Yustisi yang dilaksanakan (menurunnya pelanggaran perda)	Jumlah Yustisi yang dilaksanakan (menurunnya pelanggaran perda)	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
3.	Meningkatnya ketentraman masyarakat	Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio linmas	Jumlah kecamatan yang mempunyai rasio anggota linmas sesuai SPM/Jumlah kecamatan dikali dengan seratus persen	
4.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase Laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam	Jumlah laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam/jumlah laporan yang diterima dikali dengan seratus persen	

29. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Terjaganya kualitas lingkungan sehingga tetap memenuhi standar baku mutu lingkungan	Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	(Kualitas udara di titik pantau yang memenuhi baku mutu/jumlah titik kualitas udara yang dipantau) x 100%	Kantor Lingkungan Hidup
		Jumlah sungai utama kualitas airnya memenuhi status mutu kelas IV golongan B	(Jumlah sungai yang memenuhi baku mutu kelas IV golongan B/ jumlah sungai utama di Kabupaten Tapanuli Utara) x 100%	
2	Peningkatan profesionalisme pengelolaan Lingkungan yang handal	Persentase SDM yang memiliki sertifikasi Amdal A	(Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi Amdal A dibagi dengan jumlah seluruh SDM) 100%	Kantor Lingkungan Hidup
		Persentase SDM yang memiliki sertifikasi Amdal B	(Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi Amdal B dibagi dengan jumlah seluruh SDM) 100%	
		Persentase SDM yang memiliki sertifikasi Amdal C	(Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi Amdal C dibagi dengan jumlah seluruh SDM) 100%	
		Persentase SDM yang memiliki sertifikasi Tenaga Teknis	(Jumlah SDM yang memiliki sertifikasi Tenaga Teknis dibagi dengan jumlah seluruh SDM) 100%	
3.	Peningkatan peran aktif masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam	Tingkat partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam program Adipura	Tingkat partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam program Adipura	Kantor Lingkungan Hidup
		Peraihan Adipura	Peraihan Adipura	
		Jumlah sungai yang ikut program Prokasih	Jumlah sungai yang ikut program Prokasih	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	menciptakan Kota Bersih, Indah dan Tertib	Jumlah Perusahaan yang ikut Proper	Jumlah Perusahaan yang ikut Proper	
3	Peningkatan kualitas pengendalian Dampak Lingkungan dalam upaya meminimalisir Perusakan dan Pencemaran Lingkungan	Persentase Usaha yang mengolah B3 dengan baik	Persentase Usaha yang mengolah B3 dengan baik	Kantor Lingkungan Hidup
		Persentase Perusahaan yang sudah Amdal/UKL-UPL	Persentase Perusahaan yang sudah Amdal/UKL-UPL	Kantor Lingkungan Hidup
		Persentase Produk Ramah Lingkungan	Persentase Produk Ramah Lingkungan	
4	Meningkatnya akurasi Data Potensi Lingkungan Hidup Pemda	Persentase Akurasi Data Base Limbah Cair	Persentase Akurasi Data Base Limbah Cair	Kantor Lingkungan Hidup
		Persentase Akurasi Data Base Air Bawah Tanah	Persentase Akurasi Data Base Air Bawah Tanah	Kantor Lingkungan Hidup
		Persentase Akurasi Data Base SLHD	Persentase Akurasi Data Base SLHD	Kantor Lingkungan Hidup
		Persentase Akurasi Data Base IPAL	Persentase Akurasi Data Base IPAL	Kantor Lingkungan Hidup
		Persentase Akurasi Data Base Kegiatan Amdal & UKL- UPL	Persentase Akurasi Data Base Kegiatan Amdal & UKL- UPL	Kantor Lingkungan Hidup
		Persentase Akurasi Data ISPU (Index Standar Pencemaran Udara	Persentase Akurasi Data ISPU (Index Standar Pencemaran Udara	Kantor Lingkungan Hidup
5	Terwujudnya Konservasi SDA & Keaneka ragaman Hayati	Persentase Aneka Hayati yang dilindungi	Persentase Aneka Hayati yang dilindungi	Kantor Lingkungan Hidup
		Persentase Pengguna ABT yang telah punya Izin	Persentase Pengguna ABT yang telah punya Izin	
		Persentase Peningkatan Penerimaan Restribusi ABT	Persentase Peningkatan Penerimaan Restribusi ABT	
		Persentase yang menggunakan air sesuai ketentuan	Persentase yang menggunakan air sesuai ketentuan	
6	Meningkatnya Ketaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	% Dumas tentang Pelanggaran Peraturan Lingkungan yang ditindak lanjuti	% Dumas tentang Pelanggaran Peraturan Lingkungan yang ditindak lanjuti	Kantor Lingkungan Hidup
		Persentase Kasus Pencemaran yang ditangani	Persentase Kasus Pencemaran yang ditangani	

30. KANTOR KETAHANAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Terjaganya ketersediaan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Cara Perhitungan PPH: Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor. Rumus penyediaan pangan adalah : $Ps = Pr - Ast + Im - Ek$ Dimana : Ps : Total Penyediaan dalam negeri Pr : Produksi Ast : Stok Akhir-Stok Awal Im : Impor Ek : Ekspor	Kantor Ketahanan Pangan
		Penguatan cadangan Pangan Daerah	Cara pengukuran Indikator Penguatan cadangan pangan yaitu Pemerintah Kabupaten Harus menyediakan cadangan pangan kabupaten Tapanuli Utara equivalenten beras mulai tahun 2014 sebanyak ton, selanjutnya dari taun 2015-2019 sebesar ...ton setiap tahunnya.	Kantor Ketahanan Pangan
		Tingkat Konsumsi Pangan Beras	Rumus Penghitungan Konsumsi Beras (Jumlah beras yang masuk+ Raskin+Produksi Kabupaten Tapanuli Utara) dibagi dengan jumlah penduduk	Kantor Ketahanan Pangan
		Tingkat konsumsi Pangan Daging	(Jumlah Daging Yang Masuk+Jumlah Produksi Kabupaten Tapanuli Utara) dibagi dengan jumlah penduduk	Kantor Ketahanan Pangan
		Tingkat Konsumsi Pangan Ikan	(Jumlah ikan yang masuk+Produksi Kabupaten Tapanuli Utara) dibagi dengan jumlah penduduk	Kantor Ketahanan Pangan
2.	Terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, berimbang dan aman (3B+)	Persentase jumlah konsumsi pangan non beras yang di konsumsi masyarakat		Laporan hasil survey lapangan Laporan tahunan dan evaluasi triwulan dari UPTB

31. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya akses jaringan/layanan komunikasi dan informatika, seni budaya dan olahraga bagi seluruh lapisan masyarakat	Tersedianya rehabilitasi prasarana olahraga		Dinas Pemuda dan Olahraga
		Terlaksananya pengadaan alat olahraga		

32. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARUTUNG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata hasil survey kepuasan pelanggan di RUD Tapanuli Utara	Rumah Sakit Umum Daerah
		Pencapaian Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Bab yang terpenuhi sesuai persyaratan kelulusan akreditasi tingkat madya (8 bab minimal masing-masing 80% dan 7 Bab minimal masing-masing 20%)	
		Prosentase pelayanan terhadap pasien Keluarga Miskin Yang datang ke rumah sakit	Jumlah pasien keluarga miskin yang dilayani rumah sakit dibagi dengan jumlah seluruh pasien keluarga miskin yang datang ke rumah sakit diakli dengan seratus persen	

33. AKADEMI BIDAN PEMKAB TAPANULI UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas Bidan Pemkab Tapanuli Utara	Jumlah Bidan lulusan Akademi Bidan Pemkab Tapanuli Utara dengan nilai baik		
		Jumlah bidan yang memasuki dunia kerja		

34. KANTOR KECAMATAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Permenpan Nomor 16 Tahun 2004) dan Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2014)	Kantor Kecamatan
		Persentase keluhan/Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh pengaduan pelayanan administrasi dikali dengan seratus persen	
		Persentase jumlah permohonan perizinan yang dilayani sesuai standar pelayanan	Jumlah permohonan perijinan yang dilayani sesuai standar pelayanan dibagi dengan permohonan perijinan dikali dengan seratus persen	
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) kecamatan	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP dan KK) tepat waktu	Adalah jumlah prosentase KTP tepat waktu ditambah prosentase KK tepat waktu dibagi 2 dikali dengan seratus persen.	Kantor Kecamatan
		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Perbandingan antara jumlah lembaga kemasyarakatan yang memenuhi kriteria aktif dengan jumlah lembaga kemasyarakatan se kabupaten Tapanuli Utara dikali dengan seratus persen	

35. KANTOR KELURAHAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Permenpan Nomor 16 Tahun 2004) dan Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2014)	Kantor Kelurahan
		Persentase keluhan/Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah keluhan/pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti dengan jumlah seluruh pengaduan pelayanan administrasi dikali dengan seratus persen	
		Persentase jumlah permohonan perizinan yang dilayani sesuai standar pelayanan	Jumlah permohonan perijinan yang dilayani sesuai standar pelayanan dibagi dengan permohonan perijinan dikali dengan seratus persen	
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) Kelurahan	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP dan KK) tepat waktu	Adalah jumlah prosentase KTP tepat waktu ditambah prosentase KK tepat waktu dibagi 2 dikali dengan seratus persen.	Kantor Kelurahan
		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	Perbandingan antara jumlah lembaga kemasyarakatan yang memenuhi kriteria aktif dengan jumlah lembaga kemasyarakatan se kabupaten Tapanuli Utara dikali dengan seratus persen	

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

ALBOIN